



**GENDER DALAM KOMUNIKASI POLITIK  
AKTIVIS PARTAI ISLAM  
(Analisis Terhadap Aktivist PBB, PPP dan PKS di Padang)**

**Alqanitah Pohan**

***Abstract***

*Affirmative action in gender mainstreaming at politic party, is marked with the existence of quota 30% women role in nomination quota of legislative member inviting pro and contra. There are two perspectives in looking at this gender. First, positivistic perspective (or objective) which sees that women have to be given opportunity in political space, its importance if women to have make of policy. Proper women isn't it well-balance position with men in legislative because amount residents of more women compared to men. Second the naturalistic perspective (or subjective). Which my tries to express that women have their own responsible and their readiness of women to enter political world. The activities of model political communications of Islamic activist party, activist humanity and with candidate elector of legislative general election 2004 there are three models which conventional model, contemporary model and mutant model.*

**Key words :** *Gender, Islamic activist party and political communications model*

**A. Pendahuluan**

Seiring bergulirnya reformasi, bermunculan partai-partai kecil yang mengambil kesempatan untuk menjadikan aktivisnya sebagai wakil rakyat. Selain dari partai kecil, ada juga partai besar “muka lama” yang terus meyakinkan massa untuk tetap mendukungnya. Perjuangan aktivis partai tersebut guna memperjuangkan aspirasi rakyat di lembaga legislatif. Untuk melancarkan jalan aktivis partai sampai menduduki kursi parlemen, terjadilah perebutan pengaruh dan dukungan dari massa pendukung. Bahkan aktivis partai berusaha meyakinkan massa di luar simpatisan yang belum menetapkan akan mendukung siapa dari partai mana untuk mendukung individu secara

pribadi. Hal tersebut dikarenakan, Indonesia pada pemilihan umum 2004 bukan lagi melakukan pemilu cara lama yang hanya mencoblos tanda gambar, melainkan pemilihan umum yang mencoblos foto calon legislatif. Dengan demikian kekuatan pesona individu lebih mempengaruhi masyarakat pemilih, disamping nilai jual sebuah nama besar partai.

Semua kegiatan komunikasi politik yang dilakukan oleh aktivis partai pada umumnya bertujuan untuk menawarkan program-program partai demi terciptanya masyarakat madani di Indonesia. Pembangunan Indonesia tersebut tidak terlepas dari pembangunan mental bangsa dan juga pembelajaran demokrasi yang selama ini masih mencari bentuk ideal. Pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan ideal dari masing-masing partai peserta pemilihan umum 2004.

Di Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu dikembangkan kebijakan nasional yang responsif gender. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non-departemen di pemerintah nasional, propinsi, maupun kabupaten atau kota harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan dan program pembangunan.

Dengan melihat persentase keterwakilan perempuan pada posisi pembuat keputusan yang terlalu sedikit maka keterwakilan perempuan Indonesia perlu ditingkatkan lagi pada posisi pembuat kebijaksanaan dan keputusan. Ada beberapa pemikiran yang berkembang dalam wacana meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lapangan pembuat keputusan, yaitu dengan memperjuangkan sistem kuota dalam berbagai lapangan strategis pembuat keputusan.

Untuk meningkatkan jumlah perempuan sebagai pembuat keputusan adalah dengan memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Tidak hanya meningkatkan jumlah perempuan, akan tetapi juga mendukung upaya meningkatkan jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga-lembaga politik hingga mencapai jumlah yang signifikan. Hal itu diupayakan agar dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan-keputusan politik

Setidaknya pemerintah telah memberikan peluang untuk perempuan memasuki dunia parlemen yaitu dengan disahkannya Pasal 65 ayat (1) dalam UU Pemilu yang baru saja disahkan berbunyi: *Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.*

Tindakan Khusus Sementara (*affirmative action*) dimaksudkan pemerintah untuk mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan diantara laki-laki dan perempuan. Tindakan ini diambil pemerintah dengan anggapan bahwa perlu suatu terobosan terhadap nilai-nilai budaya yang bias gender, yang menempatkan dan mengkondisikan perempuan dalam kedudukan inferior atau subordinasi dari laki-laki. Pemberlakuan diperlukan untuk menghentikan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang sudah berlangsung selama berabad-abad dan ini tidak dianggap sebagai suatu diskriminasi terhadap laki-laki. Pada sisi lain, hal ini merupakan suatu tindakan tercapainya kesetaraan dan keadilan diantara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam struktur dan proses pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga politik.

Tulisan ini difokuskan pada aktivis partai Islam atau lebih tepatnya partai berbasis Islam. Tiga partai yang dibahas yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) partai ini tidak lulus *electoral threshold* untuk pemilu 2004, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), merupakan partai Islam lulus *electoral threshold* dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Permasalahan gender dan komunikasi politik aktivis Partai Islam dilihat dari pendekatan fenomenologi, interaksi simbolik dan

dramaturgis. Ketiga pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menempatkan manusia sebagai manusia yang memiliki dinamika yang kompleks. Sehingga tidak ada satu atau bahkan beberapa perilaku yang sama. Hanya ada kemungkinan kemiripan-kemiripan perilaku yang dapat dipolakan atau dibuat modelnya.

Tulisan ini melihat kasus Padang, Sumatera Barat, dengan pertimbangan bahwa Padang yang mempunyai latar belakang budaya matrilineal atau garis keturunan dari pihak ibu, yang telah menjadi ciri khas negeri *Bundo Kaduang*. Otonomi daerah ternyata memberikan dampak sangat positif terhadap keberadaan perempuan di Padang Sumatera Barat, lebih-lebih ketika dicanangkan kembali ke sistem pemerintahan nagari. Kaum perempuan melalui lembaga Bundo Kanduang yang semasa Orde Baru hanya tampil sebagai pajangan dengan pakaian adat Minangkabau pada acara seremonial, kini berpeluang berkiprah luas di berbagai bidang. Hal tersebut menjadi daya tarik untuk memilih kasus daerah ini. Apakah ada kontribusi latar belakang budaya tersebut terhadap cara pandang aktivis Partai Islam dalam memaknai gender dan komunikasi politik. Aktivis Partai Islam yang dianalisis adalah aktivis PBB, PPP dan PKS.

## **B. Konstruksi Gender Aktivistis Partai Islam**

Untuk membahas mengenai konstruksi gender aktivis Partai Islam, dapat ditinjau dari beberapa aspek;

### **1. Pandangan Aktivistis Partai Islam terhadap Pengarusutamaan Gender dengan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen.**

#### **a. Siap Menerima**

Kelompok yang siap menerima perempuan mewakili kaumnya di DPR atau badan legislatif dengan angka 30% kebanyakan terlihat dari aktivis partai yang perempuan. Walaupun pada kenyataannya tidak semua aktivis yang mendukung sehingga untuk mendapatkan posisi perempuan dalam legislatif, itu tidak semudah dengan menempatkan

daftar urut calon pada partai. Karena bagaimanapun juga, untuk menempatkan posisi perempuan di kursi legislatif perlu pertarungan yang cukup melelahkan terutama pada masa kampanye di lapangan. Nah disinilah letak peranan perempuan yang masih sulit, belum lagi sikap perempuan yang lemah, sementara dalam kampanye memerlukan energi yang kuat baik moril maupun materil.

#### **b. Tidak Siap Menerima**

Pengarusutamaan gender dalam parlemen dengan kuota 30% untuk perempuan telah diketahui oleh pengurus Partai Persatuan Pembangunan, seperti yang diungkapkan oleh fungsionarisnya. Menurut pendapat salah satu aktivis perempuan, pemenuhan kuota 30% tersebut jangan terlalu dipaksakan, karena belum siap baik secara individu maupun dari partai. Kualitas dan kredibilitas perempuan sendiri belum mencukupi. Berbeda dengan ungkapan sebelumnya, yang juga dari PPP. Tampaknya, apa yang dikemukakan aktivis PPP yang laki-laki, seolah-olah memahami betul soal kebutuhan partai, selain ia tidak menginginkan pemaksaan terhadap perempuan untuk duduk dalam legislatif juga karena harus mamandang kapasitas perempuan itu sendiri.

#### **c. Menolak**

Kuota 30% perempuan di parlemen tidak disetujui oleh beberapa aktivis partai. Salah seorang aktivis berpendapat bahwa, jangan ada angka batasan, 30% atau angka lainnya. Lebih baik perempuan tidak dibatasi akan tetapi dibiarkan untuk mengekskiskan dirinya di kancah politik. Biarkan perempuan menjadikan dirinya siap menghadapi keadaan nyata di dunia politik. Jika diberi tindakan khusus (*affirmative action*) perempuan justru tidak siap menghadapi kenyataan lapangan di panggung politik yang penuh intrik. Tapi jika perempuan tumbuh besar dan belajar dari pengalamannya dalam mengambil peran di panggung politik, justru mereka lebih kuat dan dapat menghadapi kerasnya dunia politik.

## **2. Pengaruh Budaya terhadap Konstruksi Gender Aktivistis Partai Islam.**

### **a. Perempuan Berperan di Wilayah Domestik.**

Salah satu isu yang berkembang di antara aktivis Partai Islam adalah tentang peran perempuan di wilayah domestik. Artinya perempuan mempunyai beban tanggung jawab dalam mengurus dan mengatur rumah tangga. Isu tersebut mempengaruhi bentuk komunikasi politik aktivis partai politik Islam. Komunikasi politik sebagian aktivis Partai Islam pun dipengaruhi oleh pandangan bahwa peran perempuan menurut nilai-nilai adat dan tradisi adalah seputar perempuan urusan domestik rumah tangga meliputi urusan dapur sumur dan kasur. Seperti halnya yang dikemukakan oleh salah seorang aktivis laki-laki dari PKS yang berpendapat bahwa, menurutnya alangkah lebih baiknya perempuan itu tetap berada di rumah mengurus anak-anak dan keluarganya. Karena kewajiban utama perempuan adalah mendidik dan menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan menjadi generasi rabbani. Selain itu perempuan juga berkewajiban menjaga, memelihara dan mengatur harta suaminya. Sementara kewajiban mencari nafkah ke luar rumah adalah kewajiban suami.

### **b. Perempuan berperan di wilayah publik mengurus keperluan dan kepentingan perempuan.**

Berbeda dari kelompok pertama yang mengutamakan peran perempuan di wilayah domestik, kelompok kedua mengemukakan bahwa perempuan sudah waktunya meluaskan kiprah sampai ke wilayah publik, bahkan harus merambah sampai ke wilayah politik. Aktivistis yang beranggapan perempuan harus melangkah ke dunia politik, bahkan menyasarkan kuota 30% perempuan di lembaga legislatif. Kelompok aktivis Partai Islam yang menuntut kesetaraan gender ini berpendapat bahwa kalau dirasioikan dari 57% pemilih perempuan maka kuota 30% tersebut belum merupakan angka maksimal sebagai wakil perempuan di parlemen. Namun mereka juga menyadari bahwa, sesuatu yang baru dicanangkan tidak mungkin bisa

dipenuhi secara keseluruhan. Tetapi mereka berharap kalau bisa setelah 30% kuota telah terpenuhi, di masa yang akan datang bisa setara, semisal 50% / 50%. Sehingga menurut mereka hal tersebut bisa *balance* antara anggota parlemen laki-laki dan perempuan. Mereka mengharapkan keperluan masyarakat terakomodir terlebih kepentingan-kepentingan perempuan bisa terpenuhi.

### **c. Perempuan Berperan di Wilayah Publik Tanpa Diskriminasi.**

Perempuan berperan di wilayah publik tanpa diskriminasi, maksudnya perempuan tidak hanya mengurus kepentingan perempuan saja. Atau dengan kata lain sebagai sub ordinasi dari sebuah kerja yang besar. Hal tersebut bisa terwujud dengan memberikan semua kemungkinan pembagian kerja pada perempuan, kemampuan profesionalnya bukan karena keperempuanannya atau hal-hal yang hanya mengurus urusan perempuan saja. Penempatan perempuan pada segala posisi sesuai profesi dan keahlinya tidak terlepas dari bagaimana peran-peran politik yang dimainkan perempuan. Jika peran politik tidak memandang perbedaan gender maka diskriminasi pun tidak akan terjadi.

### **3. Kritik Terhadap Kuota 30%**

Pada kenyataannya, kehidupan perempuan dan laki-laki di Padang khususnya, juga Sumatera Barat umumnya adalah saling melengkapi. Perempuan dan laki-laki secara umum tidak saling menindas satu sama lain. Jika kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada laki-laki bukan berarti perempuan tidak boleh mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Tidak sedikit perempuan Minang yang mandiri membiayai kebutuhan keluarga mereka. Apakah mencari nafkah dikarenakan ditinggal mati suaminya, bercerai, atau suami yang tidak bisa menafkahi keluarga.

Pada umumnya perempuan Minangkabau produktif secara ekonomi. Selain ada yang berkarir secara formal di luar rumah seperti menjadi PNS, perempuan Minang juga banyak yang menjadi pengusaha, dari pengusaha kelas kecil, menengah dan besar untuk ukuran daerah. Jika tidak menjadi pengusaha, mereka biasanya

berdagang, bertani, beternak dan di beberapa daerah yang mempunyai kekhasan daerah, perempuan banyak berkarya di rumah. Kreasi yang menjadi pilihan adalah menjahit bordir dan menenun kain songket. Secara umum kecenderungan perempuan Minang, tidak mau berpangku tangan menunggu pemberian nafkah dari suami semata, akan tetapi selalu kreatif untuk menghasilkan pendapatan tambahan untuk keluarga

Dari kenyataan sejarah, juga dapat dilihat bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan dan peran masing-masing di masyarakat yang tidak saling memperebutkan. Sebagai contoh kedudukan perempuan adalah bundo kanduang sebagai "*limpapeh rumah gadang*" (pilar rumah adat) yang artinya perempuan sebagai penyangga dalam keluarga. Bundo kanduang tidak akan bisa tergantikan oleh laki-laki manapun di daratan minang tersebut. Sebagai pilar rumah tangga, bundo kanduang atau perempuan Minangkabau tempat bermusyawarah bagi keluarga mereka. Tanpa ada persetujuan dan pendapatnya tidak bisa suatu keputusan akan ditetapkan. Itu artinya perempuan mempunyai akses dan kontrol yang kuat dalam lingkungan keluarga, ikut memberikan kontribusi dalam membuat keputusan. Apakah keputusan tersebut berkaitan dengan kepentingan domestik rumah tangga tersebut atau kebijaksanaan publik dari keluarga tersebut.

Sebagaimana peran bundo kanduang, demikian juga kedudukan datuak atau ketua adat, juga tidak akan pernah dipegang oleh seorang perempuan. Walaupun tidak ada seorang laki-laki pun pada keturunan dan suku mereka, otomatis mereka tidak ada datuak diistilahkan "*batang tarandam*". Keadaan tanpa pimpinan adat atau datuak tersebut berlangsung sampai ada diantara keturunan mereka yang laki-laki sehingga bisa menjadi datuak kembali dengan istilah "*mambangik batang tarandam*".

Kondisi perempuan dan laki-laki yang menjadi mitra seiring dan sejalan tanpa diskriminasi sesuai kedudukan dan peran masing-masing telah menjadi suatu tatanan yang ideal menurut masyarakat Minang.

Jarang mereka yang merasa tertindas, dan tidak puas dengan kondisi tersebut. Laki-laki dan perempuan bersaing sehat untuk mendapatkan pekerjaan dan jabatan di lembaga formal, sesuai kapasitas dan kuaalitas masing-masing individu. Jika seorang perempuan dianggap layak menduduki posisi pada jabatan tertentu dan tidak ada yang bisa menyaingi, maka jabatan tersebut akan diberikan kepada perempuan. Demikian juga sebaliknya jika laki-laki yang lebih layak, maka laki-laki lah yang akan mendapatkan kedudukan tersebut. Satu hal sebagai pertimbangan, jika kedudukan yang sama layak diduduki oleh laki-laki dan perempuan dalam waktu bersamaan, biasanya kedudukan tersebut akan diprioritaskan untuk laki-laki. Hal tersebut disebabkan skala prioritas dari pertimbangan adat dan agama, bahwa perempuan prioritas urusan domestik rumah tangga di rumah dan laki-laki di wilayah publik. Perempuan Minang biasanya menerima keadaan tersebut karena kesadaran akan tanggung jawab dan skala prioritas.

Keadaan yang sudah stabil dalam masyarakat tersebut, justru terganggu dengan adanya kuota 30%. Perempuan justru dipaksakan untuk memenuhi kuota, sementara mereka belum siap untuk itu. Sementara dari pihak laki-laki merasa mereka harus berkompetisi dengan perempuan yang bisanya adalah mitra dalam segala hal bukan lawan politiknya. Laki-laki terpaksa memberikan peluang yang seharusnya diberikan kepada perempuan berdasarkan kemampuannya bukan karena prioritas. Kondisi seperti inilah yang bias gender untuk masyarakat Minangkabau.

Artinya dunia politik seharusnya bebas gender sehingga bisa ditaklukkan oleh siapapun terlepas individu yang memperoleh kesempatan tersebut laki-laki atau perempuan. Dalam dunia politik tidak perlu ada diskriminasi seperti *affirmative action* (tindakan khusus sementara). Karena itu tidak akan membantu banyak

### **C. Model Komunikasi Politik Aktivistis Partai Islam**

#### **1. Model Komunikasi Politik Putih;**

Komunikasi politik putih adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh orang-orang Islam, yang menerima norma-norma Islam, teguh memegang prinsip sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut, tidak terpengaruh dengan godaan untuk berbuat keluar jalur atau menabrak nilai-nilai yang dianut.

## **2. Model Komunikasi Politik Hitam**

Komunikasi politik hitam adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh orang-orang Islam, tahu dan mengerti dengan norma-norma Islam, akan tetapi tidak memegang prinsip sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut, dan menghalalkan segala cara tanpa menghiraukan untuk memperoleh tujuan politiknya.

## **3. Model Komunikasi Degradasi Hitam-Putih.**

Komunikasi politik degradasi hitam-putih adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh orang-orang Islam, yang tahu dan mengerti dengan norma-norma Islam, akan tetapi cenderung untuk mudah tergoda dengan kepentingan politik praktis sesaat, walaupun harus berbuat keluar jalur atau melanggar nilai-nilai yang dianut.

## **D. Aktivitas Politik Aktivis Partai Politik Islam**

Dalam pembahasan penelitian ini peneliti mengemukakan tiga kelompok besar aktivitas yang dilakukan oleh aktivitas partai politik Islam, yakni;

### **1. Aktivitas Kontemporer**

Aktivis politik kontemporer dari Partai Islam dilabelkan dengan aktivis kontemporer, sebagai pembeda dengan aktivis yang konvensional. Pada bahasan ini diberikan julukan tersebut kepada aktivis Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena dari semua kegiatan dan aktivitas dari kader dan simpatisan partai ini berbeda dari aktivis konvensional yaitu dari aktivis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan aktivis Partai Bulan Bintang (PBB).

Perbedaan mereka sangat signifikan walaupun sama-sama partai Islam, mulai dari identitas personal aktivis, kegiatan kepartaian, pengkaderan dan cara mereka melakukan komunikasi politik dalam bentuk kampanye, persuasif dan lain sebagainya.

## **2. Aktivitas Konvensional**

Model aktivitas komunikasi politik konvensional, adalah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh partai politik sejak pemerintahan orde lama. Ciri khas dari aktivitas partai politik ini adalah benar-benar individual, walaupun terangkai dalam suatu susunan keorganisasian yang besar. Masing-masing caleg berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai tokoh yang berpengaruh di tengah masyarakat. Sedikit sekali kerjasama yang dilakukan dalam tubuh partai untuk menokohkan seseorang. Model aktivitas konvensional ini diterapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

## **3. Aktivitas Mutan**

Pada dasarnya aktivitas komunikasi politik terbagi pada dua kubu besar aktivitas politik. Dua kubu tersebut adalah konvensional yang sering dilakukan oleh aktivis PPP dan PBB sedangkan kubu berikutnya adalah kontemporer yang dilakukan oleh aktivis PKS. Ada satu karakteristik lagi yang terlihat diluar kedua kubu tersebut. Kita menyebutnya dengan kelompok mutan (menyimpang). Yaitu kelompok yang seharusnya berada pada aktivitas konvensional atau kontemporer, tetapi mereka justru sebaliknya melakukan aktivitas seperti yang dilakukan pada kubu lainnya. Artinya mereka keluar dari kelompok mereka dalam melakukan aktivitas politik, baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Aktivitas kelompok mutan dikelompokkan atas dua bagian besar yaitu, mutan dari konvensional ke kontemporer dan mutan dari kontemporer ke konvensional. Yang dimaksud dengan aktivitas mutan konvensional ke kontemporer adalah pada dasarnya aktivitas politik yang dilakukan aktivis politik sebuah partai yang mayoritas dan dominan aktivitas

konvensional akan tetapi ada bagian-bagian tertentu aktivitasnya yang merupakan termasuk kepada aktivitas politik kontemporer.

### **E. Partai Politik, Kampanye dan Pemilu Sebagai Teater**

Membicarakan dunia politik, kita teringat Kisah Seribu Satu Malam yang dikisahkan di zaman kekhalifahan Abbasiyah. Kisah Seribu Satu Malam adalah cerita berbingkai yaitu dalam satu kisah ada kisah yang lain dan dalam kisah yang lain itu juga ada cerita lain begitu seterusnya sehingga cerita itu tidak pernah selesai. Dan cerita tersebut diceritakan secara turun temurun sampai pada telinga kita. Disamping itu kisah tersebut adalah kisah yang diceritakan sebagai pengantar tidur.

Demikian juga dengan “Kisah Seribu Satu Malam di Dunia Politik”, dalam satu cerita ada cerita lain. Dalam satu panggung drama ada bentuk drama lain yang ditampilkan. Berbeda dengan *Kisah Seribu Satu Malam* versi lama, ceritanya adalah dongeng. Tidak begitu dengan “Kisah Seribu Satu Malam di Dunia Politik” ceritanya adalah kisah nyata. Walaupun berbeda, tetapi kedua kisah itu belum ada akhir dan selalu bersambung pada seri berikutnya.

### **F. Referensi**

- A.A, Navis. 1982. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Gratifi Press.
- Al Afghani, Sa'id. 2001. *Pemimpin Wanita di Kancah Politik; Studi Sejarah Pemerintahan 'Aisyah*. (Judul asli; “Aisyah wa Syiyasyah”). Terjemahan: Moch. Syafruddin. Surabaya: Pustaka Pelajar & Pustaka LP2IF.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Furkon, Aay Muhamad. 2004. *Partai Keadilan Sejahtera; Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Teraju (PT. Mizan Publika)

- Hakimi, Idrus, Datuak Panghulu. 1968. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau..* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Kamarudin. 2004. *Ada Apa dengan Partai Keadilan Sejahtera; Catatan dari Warga Universitas Indonesia.* Depok: Pustaka Nauka.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (Tim red). 2000. *Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.* Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan. Jalan Merdeka Barat No. 15.
- Leclerc, Annie. 2000. *Kalau Perempuan Angkat Bicara.* Yogyakarta: Kanisius.
- Liliwari, Alo. 2000. *Politik Komunikasi dan Komunikasi Politik (Suatu Analisis Tentang Isi Pesan Beberapa Surat Kabar di Kupang.* Bandung: YPSDM
- Nimmo, Dan. 1999. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Paul, Johnson Doyle. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern.* (terjemahan) Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Pearson, Judy Cornella. 1985. *Gender and Communication.* London: Brown Company Publishes
- Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer.* (terjemahan). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Islam dan Politik Mungkinkah Bersatu?.* Bandung: Syaamil Cipta Media.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Karakteristik Politik Islam.* Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Rogers, E.M. & Storey J.D. 1987. *Communication Campaign.* Dalam C.R. Berger & S.H. Chaffee (Eds.), *Handbook of Communication Science.* New Burry Park. CA: Sage.

- Rosa, Helvi Tiana & Izzatul Jannah. 2003. *Bukan di Negeri Dongeng; Kisah Nyata Para Pejuang Keadilan*. Bandung: Syaamil Cipta Media
- Stowasser, Barbara Freyer. 2001. *Reinterpretasi Gender; Wanita dalam al Quran. Hadits dan Tafsir*. (Judul Asli: Women in the Qur'an, Tradition, and Interpretation), Terjemahan: H.M. Mochtar Zoerni. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Susanto, Astrid S. 1985. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

**Surat Kabar:**

- Katharina, Riris. 2002. Senin. 29 April. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. **Kompas**.
- Sumayardi, I Nyoman. 2002. Senin. 11 November. *Kuota 30% Bagi Perempuan, Untuk Apa?*. **Pikiran Rakyat**.
- Wahyuningroem, Sri Lestari. 2002. Senin 23 September. *Sistem Pemilu, Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan*. **Kompas**.
- Wibowo, Indiwana Seto Wahyu. 2002. Selasa. 15 Oktober. *Di Bidang Politik Perempuan Tetap 'Dibawah' Pria*. **Media Indonesia**.